GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Suara Pembaruan
Tgl/Bln/Thn : 22 agustus 2007
Subyek : Pemanasan Global
Hari : Rabu
Halaman : 06

Antisipasi Perubahan Iklim

Kebijakan Energi Harus Direvisi

[JAKARTA] Kebijakan pemerintah tentang energi dinilai telah salah kaprah dan harus segera direvisi. Kebijakan yang mendukung penggunaan bahan bakar fosil (*fossil fuel*) yang banyak menghasilkan gas karbon sudah harus secara bertahap direduksi guna menciptakan lingkungan yang lebih baik.

Hal itu disampaikan Pengamat Lingkungan, Prof Emil Salim, di depan ratusan peserta sidang gabungan terbuka pimpinan dan majelis perekayasa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), di Jakarta, Selasa (21/8).

Emil Salim mengatakan, bahan bakar fosil, seperti minyak bumi, gas, dan batu bara menghasilkan gas karbon di mana gas ini berperan sangat penting dalam meningkatnya pemanasan bumi yang memicu terjadinya perubahan iklim.

Mantan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup ini mengaku heran dengan sikap pemerintah yang berpihak kepada penggunaan bahan bakar fosil daripada bahan bakar terbarukan, yakni dengan cara memberi subsidi sebesar Rp 61 triliun pada 2007, dan untuk energi listrik Rp 25,8 triliun.

"Kenapa kita mensubsidi bahan bakar yang membahayakan manusia. Konyol itu. Subsidi harus dihilangkan tetapi harus bertahap," ujar Emil.

Penasihat Presiden bidang lingkungan hidup ini meminta agar selain secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap *fossil fuel*, pemerintah juga diminta untuk segera bertindak menjaga dan memelihara hutan tropis sebagai salah satu cara mengurangi emisi gas rumah kaca.

Saat ini, tambah Emil, Indonesia menjadi negara terbesar ketiga di dunia sebagai pembuang emisi, dan sektor yang terbesar menyumbang adalah kebakaran hutan atau deforestasi. Amerika Serikat (AS) menduduki posisi pertama, disusul Tiongkok. Di belakang Indonesia ada Brasil, Rusia, dan India.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Emil mengingatkan, tahun 2020, jika tidak ada langkah nyata dari pemerintah, Indonesia berpeluang menjadi negara terbesar penghasil emisi mengalahkan AS. Dia juga menyinggung rencana pembukaan lahan kelapa sawit besar-besaran di beberapa wilayah Indonesia, seperti Kalimantan dan Papua, dengan mengambil lahan hutan tropis.

"Saya heran, masak hanya karena harga CPO (*crude palm oil*) naik, semua daerah disawitkan. Gila itu! Untuk mengantisipasi perubahan iklim, kebijakan yang mesti diambil adalah kebijakan yang menyerap karbon dengan mengembangkan reforestasi dan menghindari deforestasi," katanya.

Selain itu, pengembangan energi yang terbarukan harus terus dilakukan karena memiliki potensi dan sumber daya yang sangat besar. "Untuk memanfaatkan berbagai energi terbarukan perlu ilmu dan teknologi, dan saya berharap BPPT bisa melakukannya," ucap Emil.

Mantan Menteri Riset dan Teknologi yang juga mantan Kepala BPPT, Rahardi Ramelan, mengatakan, pemerintah harus memiliki sikap yang tegas dalam upaya mengantisipasi perubahan iklim. [E-7]

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP